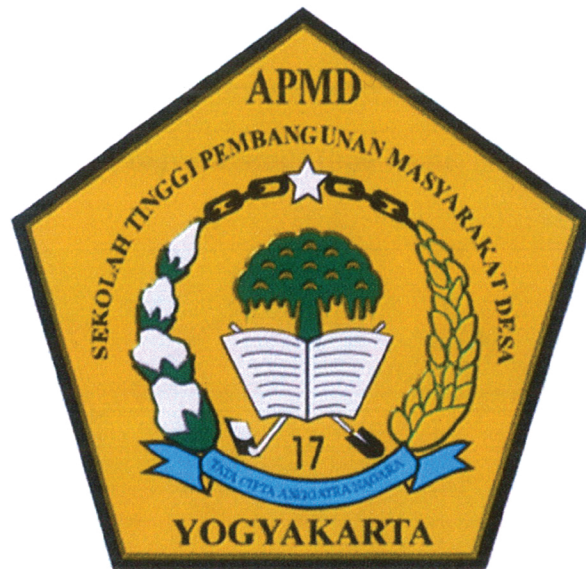


**SKRIPSI**

**GOVERNING DIGITALISASI DESA KALURAHAN SINDUHARJO,  
KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN**



**Disusun Oleh:**

**AGUSTINA FRETTY FANNIE ELDA**

**19520062**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**GOVERNING DIGITALISASI DESA KALURAHAN SINDUHARJO,  
KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Januari 2024

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si  
Penguji Samping I

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si  
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rujek Samaloisa, S.Sos., M.Si

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina Fretty Fannie Elda  
NIM : 19520062  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Governing Digitalisasi Desa Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 10 Febuari 2024

Yang membuat pernyataan



Agustina Fretty Fannie Elda

19520062

## **MOTO**

“Ketulusan adalah kunci kebahagiaan sejati”

**(Wenefrida Hubung)**

“Selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan hidup harus selalu bersyukur”

**(Chrispinus Feri)**

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah didalam Kristus Yesus bagi kamu”

**(1 Tesalonika 5:8)**

“Setiap orang mempunyai gilirannya masing-masing, bersabarlah dan tunggulah giliranmu!”

**(Gol D Roger)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun dan disajikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Saya Agustina Fretty Fannie Elda ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus, berkat kasih karunia dan petunjuk-Nya dalam proses penyusunan dan selesainya skripsi ini. Kehadiran-Nya telah menjadi sumber kekuatan, kebijaksanaan dan ketenangan selama perjalanan akademik ini.
2. Kepada orang tua saya, Bapak Mikael Lirung dan Ibu Wenefrida Hubung. Terimakasih telah menjadi pilar kekuatan dalam perjalanan pendidikan saya. Banyak kekecewaan yang saya berikan dan tidak banyak juga luka yang saya berikan untuk kalian, tapi kalian selalu senantiasa mendukung dan mendoakan anakmu yang nakal ini. Maaf juga apabila saya harus menjadi anak yang tidak seperti dua saudara saya yang pintar dan penurut. Tapi kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya dukungan, cinta, dan pengorbanan yang diberikan selama ini.
3. Kepada dua saudara saya, Yohana Pitri Minefri dan Chripinus Feri Minefra. Terima kasih banyak sekali kalian mengajarkan adikmu ini untuk menjadi semakin dewasa, memang jarak usia yang jauh membuat kita tidak dekat. Tapi kalian selalu ada di saat adikmu membutuhkan bimbingan dan selalu memberikan dukungan, doa dan penyemangat bagi saya.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama penulisan skripsi. Dan tentunya saya minta maaf karena mungkin saya jauh dari ekspektasi dan harapan bapak, tetapi saya sangat berterima kasih atas bimbingan bapak selama ini. Semoga ilmu yang bapak ajarkan ke saya, selalu berguna dimanapun saya berada.

5. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo, masyarakat, dan semua narasumber yang telah membantu saya dalam proses penelitian yang saya lakukan.
6. Pasangan saya Aris Kristiawan atas dukungan, pengertian dan cinta yang diberikan selama ini, saya dapat menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman dan rekan-rekan saya yang telah berbagi pengetahuan, ide, dan dukungan selama studi dan penelitian saya ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai cara, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
9. Terima kasih almamater tercinta STPMD"APMD" Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "**GOVERNING DIGITALISASI DESA KALURAHAN SINDUHARJO, KAPANEWON NGAGLIK, KABUTAPEN SLEMAN.**" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Penulisan skripsi ini merupakan suatu upaya untuk mengkaji, menganalisis, dan mendalami isu penting dalam proses digitalisasi desa. Digitalisasi desa merupakan sebuah topik yang relevan dan strategis dalam konteks proses implementasi Sistem Informasi Desa terlebih lagi bisa menjadi tepat sasaran dalam pengembangan teknologi dalam konteks perdesaan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si yang telah memberikan panduan, arahan, dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua narasumber dan pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi mereka, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 10 Februari 2024

Agustina Fretty Fannie Elda



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Fokus Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Literatur Review</b> .....	<b>8</b>
<b>G. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>17</b>
1. Pemerintah Kalurahan .....	17
2. E-government .....	18
3. Digitalisasi .....	20
4. Governing .....	22
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Sejarah dan Keadaan Geografis Wilayah Kalurahan</b> .....	<b>32</b>
<b>B. Penggunaan Tanah</b> .....	<b>36</b>
<b>C. Keadaan Demografis</b> .....	<b>38</b>
<b>D. Keadaan Sosial dan Budaya</b> .....	<b>47</b>
<b>E. Cagar Budaya</b> .....	<b>53</b>
<b>F. Keadaan Ekonomi</b> .....	<b>53</b>
<b>G. Visi dan Misi</b> .....	<b>54</b>

a) VISI.....	54
b) MISI.....	55
b. Misi .....	56
<b>H. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan .....</b>	<b>57</b>
<b>I. Pelayan Publik .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Deskripsi Informan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Analisis Indikator .....</b>	<b>69</b>
1. Presence (Kehadiran) .....	71
2. Interaction (Interaksi).....	72
3. Transaction (Transaksi) .....	74
4. Transformation (Transformasi).....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Narasumber .....	25
Tabel 2.1 Perbatasan Kalurahan Sinduharjo.....	33
Tabel 2.2 Luas Tanah Perpedukuhan.....	33
Tabel 2.3 Luas Tanah Kalurahan Sinduharjo .....	35
Tabel 2.4 Data Menurut Gender.....	37
Tabel 2.5 Data Menurut Umur.....	38
Tabel 2.6 Data Pendidikan.....	39
Tabel 2.7 Prasarana Sekolah.....	40
Tabel 2.8 Jumlah KK.....	41
Tabel 2.9 Data Pekerjaan.....	43
Tabel 2.10 Data Agama.....	45
Tabel 2.11 Data Posyandu.....	47
Tabel 2.12 Data Kemiskinan.....	49
Tabel 2.13 Data Prasarana Perekonomian.....	52
Tabel 2.14 Data Perangkat Desa.....	56
Tabel 2.15 Data Anggota BPKal.....	59
Tabel 2.16 Data Anggota Kelembagaan.....	62

## INTISARI

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana Digitalisasi Desa mempengaruhi dalam pelayanan di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dimana dalam program digitalisasi yang sedang digalakan oleh Pemerintah Indonesia, desa merupakan ujung tombak dalam penerapannya. Dalam penerapannya, banyak desa yang tidak terlebih dahulu melakukan kajian kesiapan desa dalam penerapan desa digital. Pada umumnya masih banyak desa yang kurang mengenal sistem-sistem berbasis digital, pada era digital dituntut agar dapat mengikuti perkembangan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. dimana objek penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Sinduharjo, masyarakat dan pihak-pihak luar yang ikut serta dalam mengembangkan digitalisasi desa di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kab.Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan temuan dan analisis yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa masih adanya pro dan kontra dalam proses pengembangan Digitalisasi Desa di Kalurahan Sinduharjo. Digitalisasi Desa memang membawa pengaruh yang baik karena sangat memudahkan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang atau sibuk dengan pekerjaannya dan yang pastinya untuk masyarakat yang tidak mau ribet dan meleak teknologi. Tetapi dengan adanya digitalisasi ini tidak terlepas dari kekurangannya yang dimana masih banyak sekali masyarakat yang lanjut usia dan SDMnya yang tidak melek akan teknologi. Tentu hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pengembangan digitalisasi tersebut justru membebani pemerintah di tingkat lokal (Desa/Kalurahan), yang dimana Pemerintah pusat sering menempatkan Desa sebagai objek, sehingga program-program pemanfaatan TIK terkadang hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan.

**Kata kunci : Digitalisasi, *E-Government*, *Governing*, Pemerintahan Kalurahan Sinduharjo**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan salah satu level terkecil dari pemerintahan di Indonesia. Dalam program digitalisasi yang sedang digalakan oleh pemerintah Indonesia, desa merupakan ujung tombak dalam penerapannya. Dalam penerapannya, banyak desa yang tidak terlebih dahulu melakukan kajian kesiapan desa dalam penerapan desa digital. Pada umumnya masih banyak desa yang kurang mengenal sistem-sistem berbasis digital, pada era digital dituntut agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Desa yang menerapkan sistem teknologi digital dalam menjalankan pemerintahannya dapat disebut sebagai desa digital yang mempunyai peran penting untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Desa digital atau biasa disebut dengan istilah dedi, menurut Dahiri, dkk (2019) merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep dari desa digital memberikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Sehingga adanya desa digital diharapkan pelayanan publik dapat meningkat dan masyarakat menjadi berkembang.

Penyelenggaraan desa digital mempunyai sifat yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan secara terpadu serta terarah oleh pemerintah, badan usaha, dan

masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar di dalam penyelenggaraan penerapan desa digital demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi berupa pelayanan publik. Mewujudkan desa digital perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dalam hal pendanaan, pendampingan, literasi digital dan masyarakat, penggunaan dana desa juga mulai diarahkan untuk penerapan teknologi yang bersifat digital. Menurut Anang, dkk (2019) Desa digital juga tidak hanya berbicara digitalisasi melainkan juga menyangkut transparansi publik merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses publik, sedangkan pelayanan publik dan sosial menyangkut pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di era kemajuan teknologi saat ini, manusia hampir tidak bisa terlepas dari kebutuhan internet, karena banyak hal yang bisa dilakukan dari jaringan internet. Teknologi Komunikasi dan Informasi merupakan salah satu instrumen yang dapat diandalkan untuk mengunjang program pembangunan desa. Dengan kehadiran sistem informasi digital desa diharapkan dapat membuka akses masyarakat untuk memajukan serta mencapai kemandirian desa dan ikut membangun kejayaan Bangsa Indonesia. Dalam membangun desa yang menuju desa maju dan mandiri sistem informasi desa ini memang harus diterapkan. Sistem Informasi Desa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan pengembangan sistem informasi desa demi membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa, yang terhubung atau berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level nasional. Sistem informasi desa diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Sistem informasi desa ini diharapkan terhubung dengan sistem informasi yang lebih tinggi (Kabupaten/Kota) yang pada gilirannya akan pula terhubung/berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 UU Desa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. UU Desa lebih lanjut mengatur bahwa SID akan dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat desa beserta semua pemangku kepentingan.

Sistem Informasi Desa merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Diharapkan, Sistem Informasi Desa akan berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis TIK yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan di tingkat desa yang akan berjalan baik dalam ranah *offline* maupun *online*. Pada bentuknya yang *offline*, Sistem Informasi Desa menjejantah dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Pada bentuknya yang *online*, sistem informasi desa akan terbangun dan terhubung dalam jaringan data dan informasi berbasis internet, yang

menghubungkan desa dengan dunia luar.

Sistem informasi desa dapat berperan sebagai alat bantu atau instrument yang memungkinkan penyampaian informasi yang lebih efektif, transparan, dan akurat kepada masyarakat dengan jarak dan waktu yang ada. Dengan adanya sistemn informasi desa dapat menciptakan informasi tanpa batas, contohnya seperti regulasi, informasi tentang kebijakan, pelaksanaan program, dan pengumuman. Sehingga melalui sistem informasi desa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah desa. Sistem Informasi Desa menyediakan data dasar keluarga, data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa, serta permasalahan dalam pelayanan desa. Melalui Sistem informasi desa masyarakat tidak lepas dari berbagai bentuk pelayanan seperti surat menyurat, pembuatan Akte kelahiran, KTP, Kartu Keluarga.

Sehubungan dari itu masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang sistem informasi desa, terkait dengan adanya pelayanan publik dari Pemerintah Kalurahan melalui sistem yang ada sehingga masyarakat medapatkan dan menikmati pelayanan yang baik serta berkualitas adanya informasi desa dan pelayana publik

Hasil dari wawancara pra-observasi yang peneliti lakukan pada Selasa, 18 Juli 2023 yang dilakukan peneliti bersama Carik dan Operator SID Sinduharjo, peneliti mendapatkan fenomena yang unik, dimana informasi tentang masyarakat Kalurahan Sinduharjo dengan bebas bisa mengakses



website kalurahan di [sinduharjo.slemankab.go.id](http://sinduharjo.slemankab.go.id) yang lengkap dengan isinya seperti berita, agenda-agenda, produk hukum, laporan, panduan layanan publik, dan potensi dari Kalurahan Sinduharjo.

Jadi, untuk memaksimalkan dalam penyebaran informasi dan pelayanan publik secara mudah sedikit merasa kesulitan dengan keterbatasan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam memaksimalkan penyebaran informasi ada di media lain seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram Sinduharjo. Dengan adanya Sistem Informasi Desa sebagai bentuk pelayanan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mempermudah efektivitas kinerja dari Pemerintah Kalurahan. Yang dimana masyarakat Kalurahan Sinduharjo tidak diharuskan untuk datang ke kantor desa untuk melakukan pelayan, karena masyarakat bisa mendapatkan info website yang sudah tersedia.

Dari uraian sebelumnya dan beberapa hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik benang merah bahwa sistem informasi desa yang diterima masyarakat itu apakah benar-benar memudahkan masyarakat atau hanya sebatas informasi media sosial saja. Dimana informasi tersebut hanya sebatas pengumuman dan tidak terlalu banyak memberi kontribusi baik dari sisi percepatan pelayanan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan semakin memiliki posisi dan peran yang strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan digitalisasi desa, Pemerintah

Kalurahan diharapkan juga mampu menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Fakta-fakta yang sudah dipaparkan menjadi hal menarik untuk diteliti terutama gerakan dalam mendigitalisasikan desa ada beberapa hal yang perlu disadari. Seperti kesiapan sumber daya manusia, regulasi, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan e-government. Pembawa digitalisasi ini memang cenderung supra desa seperti Kementrian, Pemerintah Kabupaten sampai di tingkat desa. Sehingga fakta-fakta inilah yang menarik untuk dikaji. Mengenai proses digitalisasi desa yang dilakukan oleh supradesa dan Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan sistem informasi desa (SID) pada Kalurahan Sinduharjo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang diangkat diatas, jadi peneliti mengangkat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana digitalisasi desa mempengaruhi Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan SID di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui digitalisasi desa mempengaruhi kegiatan Pemerintah Kalurahan dalam proses pengelolaan SID di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian secara objektif sesuai dengan kondisi nyata proses digitalisasi dalam mempengaruhi pengelolaan sistem informasi desa (SID) di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

- a. Bagi Pemerintah Kalurahan bisa dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi desa (SID). Disamping itu, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi kebijakan publik digitalisasi dalam mempengaruhi Pemerintah Kalurahan untuk pengelolaan sistem informasi desa di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.
- b. Bagi masyarakat desa dan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini bisa menjadi sumber kajian yang sejenis sehingga bisa mengetahui bagaimana digitalisasi mempengaruhi Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan sistem informasi desa yang ada di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

#### **E. Fokus Penelitian**

Dalam kajian ini, peneliti ingin membangun narasi menggunakan pendekatan *Governing*. Dalam hal ini berhubungan dengan Digitalisasi atau *E-Government* yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan dalam terkait aktivitas yang dilakukan di Kalurahan. Maka dengan itu, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah

sebagai berikut:

1. *Presence* (kehadiran) adanya situs web daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam situs web pemerintah. Atau pihak-pihak mana saja yang ikut serta dalam pengembangan sistem informasi desa di Kalurahan Sinduharjo.
2. *Interaction* (interaksi) ialah web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah.
3. *Transaction* (transaksi) web pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation* (transformasi) dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

## **F. Literatur Review**

1. Penelitian Antonius Along, berjudul “Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Dlingo, Bantul” (2016)

Menjelaskan bahwa Proses implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Dlingo melibatkan sinergi antara Kepala Desa, Aparat Desa, Masyarakat Desa Dlingo, dan Combine Resource Institution (CRI). Masyarakat Desa Dlingo sangat berperan aktif dalam SID, sehingga

informasi dan komunikasi terjalin dengan baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi informasi publik. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SID dalam meningkatkan transparansi informasi publik di desa. Peneliti merekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SID, meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan dalam SID, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan SID.

2. Penelitian Sakir,dkk., berjudul “Optimalisasi sistem informasi dalam meningkatkan pelayanan publik” (2019)

Menjelaskan bahwa pengembangan yang perlu dilakukan setelah program pemberdayaan sosial selesai termasuk memperbarui profil desa dan menggunakan media sosial dalam penyediaan layanan selain situs web yang telah dibuat oleh komunitas pemberdayaan atau yang sudah tersedia. Output yang dihasilkan dari layanan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan sosial di Klaster Temanggung, Jetis Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul meliputi Tersusunnya Buku Profil Dusun Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap dan detail. Temanggung memiliki situs web

yang berisi informasi dusun dan desa.

3. Penelitian Lely Indah Mindarti, dkk., berjudul “Penerapan Inovasi Sistem Informasi Guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” (2021)

Menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh Desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah kurangnya pemahaman aparat desa terhadap UU KIP 2008 dan Standar Layanan Informasi Publik Desa, serta kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi publik desa. Program yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen di Desa Arjowilangun, yaitu berupa pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan dalam upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 di desa ini.

Selain itu, berhasil dibentuk sebuah inovasi pelayanan informasi berupa website <https://desaarjowilangun.id/> yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi.

4. Penelitian Muhammad Farhan Firmansyah, dkk., berjudul “inovasi Sistem Informasi Desa dalam Pengembangan E-Government di Desa Kertayasa, Ciamis” (2022).

Menjelaskan bahwa Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dapat membantu pemerintahan desa menjadi lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan tata desa. Sistem Informasi Desa dapat mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan desa, dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa. Sistem Informasi Desa juga dapat membantu desa menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk datang.

Dengan SID, pemerintahan desa dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan desa. Melalui SID tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi mengenai Desa Kertayasa dan berita mengenai segala macam kegiatan yang sudah terlaksana. Pengembangan Sistem Informasi Desa di Desa Kertayasa diharapkan dapat memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan desa, khususnya di Desa Kertayasa, sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat desa di tinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, responsivitas, responsibilitas, dan produktivitas. Dengan Sistem Informasi Desa, pemerintahan desa dapat mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan desa, dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa. Serta Pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa di desa-desa dengan

mengembangkan Sistem Informasi Desa melalui APBN, APBD, ataupun APBDes tergantung dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa dalam penggunaan SID agar dapat memaksimalkan manfaat dari SID tersebut. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi akses internet dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di desa-desa untuk mendukung pengembangan SID. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, pengembangan SID di desa-desa dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.

5. Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Rian Rahmanda Putra, Hendra Hadiwijaya, dan Dedy Kurniawan

Penelitian yang dilakukan Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Rian Rahmanda Putra dan Hendra Hadiwijaya dan Dedy Kurniawan yang berjudul *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa* pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang era society 5.0 adalah era dimana teknologi dengan manusia mampu hidup berdampingan dengan menciptakan transformasi-transformasi digital dalam meningkatkan mutu dan kualitas hidup yang berkelanjutan. Teknologi ini diciptakan oleh manusia dan seiring berjalannya waktu akan terus berkembang. Hal ini adalah bentuk dari keperluan manusia yang bertujuan agar manusia dapat hidup secara nyaman.

Esensi dari pembangunan infrastruktur untuk multisector



merupakan salah satu isu nyata dalam era *society 5.0* dalam menciptakan pembangunan infrastruktur digital untuk multi sector dimuai dengan melakukan pembangunan desa yang disebut digitalisasi desa. Saat ini teknologi di tanah air sudah semakin pesat, meskipun teknologi di tanah air berkembang dengan pesat tetapi tidak sedikit pula bahwa teknologi di desa masih terbelakang. Pentingnya didirikan infrastruktur teknologi pada desa merupakan langkah yang harus dilakukan agar desa tidak tertinggal. Digitalisasi desa harus diterapkan untuk setiap pedesaan karena berperan dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan adanya digitalisasi bekerja dapat menjadi lebih efektif dan efisien karena memudahkan dalam menyimpan dan menyampaikan informasi dari berbagai media digital hingga seluruh masyarakat mengetahui informasi melalui jaringan internet. Teknologi mampu menjadi penggerak dan berperan sebagai perubahan dalam sosial masyarakat.

Perkembangan teknologi tidak semata hanya menyangkut daerah perkotaan saja akan tetapi di setiap daerah pedesaan mestinya harus dikembangkan kembali. Jadi bukan hanya perkotaan saja, tetapi di wilayah desa-desa terpencil sekalipun harus diperhatikan dan diutamakan dalam proses peningkatan realisasi aksesibilitas digitalisasi agar pembangunan di Indonesia tidak mengalami ketimpangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa harus mendapatkan akses informasi, termasuk juga fasilitas pendukung dan infrastruktur. Akses informasi sangatlah penting dalam

peningkatan pembangunan serta mendorong transparansi informasi tingkat desa. Serta pengembangan digitalisasi desa sangat bermanfaat untuk kemajuan desa, karena dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas desa dan mempercepat layanan. Selain itu digitalisasi desa juga dapat meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa.

Maka dengan hadirnya digitalisasi desa diharapkan mampu membuka gerbang dalam kemajuan infrastruktur di seluruh pelosok negeri supaya dapat meningkatkan level produktivitas masyarakat secara signifikan dan terjangkau. Kemudian dengan keberadaan digitalisasi desa dapat menciptakan pemerataan dalam penggunaan dan memanfaatkan teknologi untuk semua multisector di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pembangunan nasional dilakukan sebagai bentuk pembanguana Indonesia yang dimulai dengan memperkuat daerah-daerah pedesaan. Dengan adanya program digitalisasi desa diharapkan dapat menyusutkan kesenjangan teknologi yang terjadi didesa. Digitalisasi desa memiliki konsep yaitu dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian di desa melakukan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi. Maka dengan kehadiran digitalisasi desa diharapkan semua sector baik pelayan public dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi maju dan meningkat.

6. Suharsono Batun, Jayanti Yusmah Sari, Noorhasanah, Z.Syahrul, dan Arief Budiman.

Penelitian dengan judul *Digitalisasi Pelayanan Publik* menjelaskan dimasa pandemi virus Corona (Covid-19) dituntut untuk melakukan banyak adaptasi diberbagai bidang termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayan publik. Saat ini pemanfaatan internet untuk menyebarkan informasi sudah menjadi sarana komunikasi yang penting dan efektif. Internet jua sudah terbukti dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas. dengan adanya digitalisasi pelayan publik maka masyarakat tidak perlu berkumpul atau dating ke kantor desa untuk mendapatkan informasi. Selain itu pelayanan online dapat dilakukan pada proses pendaftaran, pelengkapan berkas, ataupun pengambilan nomor antrian. Sistem informasi desa akan menangani data kependudukan, dan pelayanan pembuat surat. Penelitian ini sudah dibuktikan dan terbukti dapat membantu masyarakt desa terkhusus keasaat keadaan *urgent* seperti saat *Covid-19*.

#### 7. Didit Praditya

Penelitian oleh Didit Praditya yang berjudul *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa* (Praditya, 2014), berfokus pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat desa. Penggunaan pemanfaatan TIK dalam penelitian ini diartikan sebagai penggunaan/pemanfaatan TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa melalui studi di salah satu desa di Jawa

Barat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang penerapan TIK untuk meningkatkan digitalisasi pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian Z Abdussamad yang berjudul *Development of Digital Village in Improving Public Services in Lamahu Village of Bone Bolango Regency* (Abdussamad, 2021), penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan tentang Perkembangan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu yang terdiri dari Penerapan sistem pelayanan pemerintah dengan *e-Government*, Pelayanan masyarakat pada aspek kesehatan dan keamanan berbasis android, dan Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu juga menjelaskan faktor penentu yang menentukan keberhasilan pembangunan desa digital di Desa Lamahu, diantaranya adalah Tingkat pendidikan publik, Tersedianya akses teknologi informasi, dan ada dukungan dan komitmen dari pemerintah. Ppeneliti juga mengatakan bahwa Pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek, sehingga program-program pemanfaatan TIK terkadang hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Oleh karena itu, munculnya gerakan dari desa yang memanfaatkan internet, menjadi pelajaran bahwa inisiatif dapat dilakukan dari bawah (desa).

8. Renny Fatma Dewi dan Arie Budiman

Penelitian dengan berjudul *Optimalisasi Digitalisasi Desa Dalam Pembangunan Berkelanjutan* menjelaskan tentang memanfaatkan

teknologi informasi, pemerintah desa bisa berinteraksi dan bertukar informasi dengan warga, sehingga mampu memperlancar jalannya pemerintah desa didalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Desa Wisata Tebing Breksi merupakan salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan yang mana lokasinya berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selain itu teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dengan langkah analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemerintah Kalurahan**

Kalurahan merupakan organisasi pemerintahan terendah dan merupakan suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, desa menjadi sumber terpenting atau fundamental dari segala informasi atau data bagi pemerintah supra desa dalam mengelola berbagai persoalan sosial. Pemerintah desa di wilayah Yogyakarta disebut dengan Pemerintah Kalurahan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman

Pemerintahan Kalurahan. Peraturan ini memiliki peran dan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Peraturan Gubernur DIY ini berguna untuk mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang pedoman pemerintahan kalurahan. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan.

Kedudukan dan Kewenangan Kalurahan, Penataan Kalurahan, Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan, Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Kalurahan, Badan Pemusyawaratan Kalurahan, Penghasilan Pemerintahan Kalurahan, Keuangan dan Aset Kalurahan, Pembinaan dan Pengawasan. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. E-government

Badu menyebut *E-government* adalah sebuah transformasi. Sebuah perubahan radikal paradigma manajemen pemerintahan. *E-government* juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan web

(jaringan) komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus, merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansi maupun antar Negara. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kinerja, proses pelaksanaan layanan, serta tugas pokok dan fungsinya Secara filosofis penerapan *e-government* merupakan bentuk kerja birokrasi yang secara dinamis mengalami distorsi pada lingkungan eksternal organisasi atau adanya tuntutan yang mengharuskan suatu perubahan Zuhakim (2013).

Sedangkan Kementerian Informasi dan Komunikasi Dewi (2013) mengemukakan bahwa *E-government* merupakan upaya dalam mengelaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan kerangka elektronik untuk mewujudkan kualitas layanan yang efektif dan efisien.

Sehingga dapat diartikan bahwa *e-government* merupakan sarana atau penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau pihak-pihak lain untuk menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, berkualitas, dan *humanistic*.

### 3. Digitalisasi

Untuk mengembangkan *e-government* ada empat fase yang diusulkan oleh World Bank (2002), yakni *Presence* (kehadiran), *Interaction* (interaksi), *Transaction* (transaksi) dan *Transformation* (transformasi). Keempat fase pengembangan tersebut jika dikontekskan untuk pengembangan situs web e-government di Indonesia, meliputi:

Kehadiran, yaitu memunculkan situs web daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam situs web pemerintah;

- a. Interaksi, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah;
- b. Transaksi, yaitu web pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah;
- c. Transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi (Gupta, 2004).
- d. Digitalisasi dan *e-Government* (pemerintahan elektronik) memiliki hubungan erat karena digitalisasi adalah salah satu elemen kunci dalam mengembangkan *e-Government*. Berikut adalah beberapa cara di mana digitalisasi berhubungan dengan *e-Government*:
- e. Digitalisasi Proses Administrasi: Digitalisasi melibatkan konversi



dokumen dan proses administrasi tradisional menjadi format digital. Inilah yang menjadi dasar untuk implementasi *e-Government*, di mana proses-proses pemerintahan seperti pengajuan izin, perizinan, pembayaran pajak, dan layanan publik lainnya dapat diakses dan dilakukan secara elektronik.

- f. *Aksesibilitas* dan Keterjangkauan: Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan dan informasi kepada masyarakat dengan lebih mudah dan keterjangkauan yang lebih baik melalui internet. Ini menciptakan peluang untuk mewujudkan visi *e-Government*, di mana warga dapat mengakses layanan pemerintah kapan saja, di mana saja.
- g. Efisiensi dan Transparansi: Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi pemerintah dengan mengurangi birokrasi, mengotomatisasi proses-proses, dan memungkinkan berbagi data yang lebih efektif antara departemen dan lembaga pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik.
- h. Partisipasi Publik: Melalui platform *e-Government* yang berbasis digital, warga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan lebih mudah kepada pemerintah. Ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas.
- i. Keamanan Informasi: Dalam konteks *e-Government*, keamanan

informasi sangat penting. Digitalisasi mencakup langkah-langkah untuk melindungi data dan informasi pemerintah, serta mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi privasi warga.

- j. Peningkatan Layanan Publik: Dengan digitalisasi, layanan publik dapat disediakan secara lebih cepat dan efisien, yang meningkatkan kepuasan warga.

Kesimpulan digitalisasi adalah fondasi yang memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan *e-Government* dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, transparansi, partisipasi publik, dan kualitas layanan pemerintah secara keseluruhan.

#### 4. Governing

Governing dapat didefinisikan sebagai proses pengaturan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam suatu kegiatan kolektif. Konsep ini melibatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks good governance, governing juga mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, rule of law, responsiveness, consensus-oriented, equality, effectiveness and efficiency, dan accountability. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah melakukan transformasi dari manusia menjadi rakyat, serta rakyat menjadi warga.

Perbuatan memerintah mencakup fungsi, tindakan, proses dan cara. Konsep meso mikro Governing (G2) adalah terdiri dari reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi dan lain sebagainya (Peta Penelitian Pemerintahan, 2020). Dengan demikian, memerintah tidak identik dengan perintah meski mengandung perintah. Stephen Cook (2007), dalam bukunya yang berjudul “Rulling but not Governing” mengemukakan bahwa terdapat perbedaan memerintah dan menguasai (governing dan rulling). Gagasan ini muncul berangkat dari sejarah perkembangan Militer dan Politik di Mesir yang mana Militer mendominasi dinamika politik dan lini kehidupan masyarakat. Tetapi, kekuatan militer ini tidak menjadi pemerintah karena dia tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurus. Dengan demikian, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (rulling). Dalam hal ini rulling juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah dalam artian tidak mengatur dan mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap bahwa antara rulling dan governing berbeda. Rulling bisa dilakukan oleh siapapun, Rulling mempunyai makna menguasai dan mempunyai unsur dominasi. Sementara itu, secara ideal normatif, governing melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas dan menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar,

memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. *Governing* diartikan sebagai sebuah kata kerja yang memerintah dimana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan.

Menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus, Otoritas tersebut adalah tradisi atau pengaruh dari Belanda yang sangat kuat, yakni mengatur dan mengurus di mana perbuatan hukum dan administrasi mengabaikan perbuatan politik. *Governing* memiliki padanan kata yang banyak sehingga sulit untuk dipahami, tetapi dalam pengertian bahasa Indonesia kata baku dari *governing* adalah mengatur dan mengurus. Padanan kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan dimana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi, misalnya: konsep *rulling* (menguasai), konsep *governing* (mengatur dan mengurus), konsep *ordering* (menata atau menciptakan) dan konsep *stiring* (mengarahkan). Para ilmuwan politik lebih menyukai *rulling* dari pada *governing* misalnya ilmuwan Amerika Serikat seperti Robert Dahl. Dahl sebagai ilmuwan politik, tetapi kajiannya lebih dekat dengan politik dalam pengertian pemerintahan, yang pada, yang pada tahun 1961 menulis “Who Govern” atau “siapa yang memerintah”. Dahl berbicara pada otoritas atau pada kewenangan politik yang sudah

dilembagakan dalam institusi pemerintahan. William Damhoff (1967) lebih menyukai konsep Rule yang dalam bukunya menulis “Who Rule” (siapa yang menguasai). Ia memiliki perspektif keluar dari institusi pemerintahan, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada kekuatan diluar institusi pemerintahan. Konsep governing yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil.

*Governing* mengandung proses politik, hukum dan administrasi, Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi 27 ekstraksi, distribusi, proteksi dan koersi yang dijalankan pemerintah atas negara, warga dan masyarakat. Fokus utama governing sebagai basis konsep identitas mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Membicarakan konsep governing tidak terlepas dari Kebijakan adalah tindakan utama pemerintah fungsi pemerintahan adalah protecting atau melindungi bukan hanya promoting. Fungsi memerintah yang dijalankan pemerintah yang paling utama adalah protecting untuk law and order serta distributing untuk welfare (kesejahteraan). Pemerintahan mencakup proses politik, hukum, dan administrasi yang didukung dengan teknik. Pemerintahan juga

mencakup proses *connecting*, *crafting* dan *transforming* terhadap unsur-unsur berbeda untuk melahirkan kebijakan, hukum, dan lain sebagainya. Kebijakan merupakan jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah dan dalam Ilmu Pemerintahan berbicara kebijakan dari hulu sampai hilir serta secara komprehensif berbicara konteks, kontestasi, konstitutif, konten, konsistensi, dan konsekuensi. Bahkan bisa juga bicara soal kontradiksi kebijakan. Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus dan secara responsible mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) dan pendistribusian (*distributing*) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sutoro Eko, 2021: 12-14).

Dalam keterkaitannya dengan konsep governing ini, maka perbuatan pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam menerapkan digitalisasi desa melalui sistem informasi desa dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa Pemerintah kalurahan dapat mengatur dan mengurus pola informasi dan mampu mendorong kemajuan informasi desa dengan ikut serta, memajukan desa dengan teknologi.

Azaz kebermanfaatannya dari sistem informasi desa seyogyanya di jadikan aset penunjang fundamental pemerintah kalurahan dalam menciptakan desa yang melek teknologi. Teknologi sebagai alat dan pemerintah kalurahan sebagai motor penggerak memajukan desanya

dengan informasi teknologi yang berkembang. Menata sistem penunjang dari sistem informasi desa sebagai langkah maju penyesuaian zaman, harus jadi moto dari pemerintah Kalurahan Sinduharjo, dimana skill dari pemegang sarana sistemnya perlu di perhatikan supaya transformasi informasi desa dapat berjalan dengan baik. Dibutuhkan peranan pemerintah kalurahan dan dinas, lsm sebagai instrumen penunjang lahirnya sistem informasi pemerintahan yang inovatif, kreatif dan memberi perubahan yang baik demi memajukan Kalurahan Sinduharjo.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman (2013) berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif itu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan, kemudian di analisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berperilaku seperti itu, di reduksi, di triangulasi, disimpulkan dan di verifikasi.

Berdasarkan penjelasan penelitian deskriptif kualitatif di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta secara akurat. Kemudian akan dianalisis dan disimpulkan serta mengkajinya berdasarkan metode ilmiah. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan

adalah Digitalisasi Pemerintahan Kalurahan Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Alasan memilih lokasi penelitian karena strategis dan memiliki sistem informasi desa (SID) yang lengkap, sehingga dalam pengembangan sistem informasi desa (SID) di Kalurahan Sinduharjo menarik untuk diteliti.

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah “Digitalisasi Desa Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.”

c. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini ada 9 orang informan sebagai subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Alasan memilih teknik ini karena dengan pertimbangan bahwa subyek penelitian yang diambil berhubungan dengan objek penelitian sehingga diharapkan subyek mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih narasumber yang memiliki kriteria tertentu. Terutama mereka yang terlibat langsung, mereka yang memiliki kewenangan, mereka yang mendapatkan manfaat ataupun mereka yang membuat sebab akibat.



#### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari masing-masing teknik pengumpulan data.

##### 1) Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan digitalisasi yang ada di Kalurahan Sinduharjo tahap observasi:

1. Mengamati proses pelayanan publik di Kalurahan Sinduharjo baik yang berjalan secara *offline* maupun *online*.
2. Mengamati kesesuaian alat pendukung dalam proses digitalisasi yang diberikan dengan tersedia di Kalurahan Sinduharjo.
3. Observasi mencakup partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan pelayanan secara *online*.
4. Melakukan observasi yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya digitalisasi desa di Kal.Sinduharjo.

##### 2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan Carik,

Operator SID, dan masyarakat. Tujuan dari peneliti mewawancarai lebih dari satu orang agar dapat memperoleh informasi tidak dari satu atau dua orang saja, sehingga mendapatkan informasi dari beberapa macam sudut pandang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang lalu. Peneliti mendapatkan dokumentasi seperti berbentuk tulisan misalnya peraturan, website, komputer atau alat-alat yang digunakan atau kebijakan maupun berbentuk foto.

### 4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan ada 3 (Tiga) macam analisis data yaitu diawali dengan pengumpulan data selanjutnya reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

#### a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik

analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan)

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan yaitu cara berfikir dimulai analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan. Suyitno (2018)

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan Kalurahan Sinduharjo. Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

#### **A. Sejarah dan Keadaan Geografis Wilayah Kalurahan**

Kalurahan Sinduharjo merupakan salah satu kalurahan yang secara administrative kewilayahannya berada di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Undang-

Undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kalurahan Sinduharjo adalah sebuah kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Sinduharjo berasal dari dua kata, yaitu *Sindu* dan *Harjo*. Kata *sindu* berasal dari kata *bindu* yang berarti air, sedangkan *Harjo* bersal dari kata *raharjo* yang dapat diartikan sebagai kemakmuran. Jadi nama Sinduharjo sendiri berarti air sebagai sumber kemakmuran. Pada awal terbentuknya Kalurahan Sinduharjo adalah sebuah kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang mana pada awal terbentuknya terdiri atas penggabungan dari 3 (tiga) wilayah Kalurahan lama yaitu;

1. Kalurahan Gentan
2. Kalurahan Dayu
3. Kalurahan Prujakan.

Sampai dengan saat ini Pejabat Lurah Sinduharjo baru dijabat oleh 4 orang yaitu :

1. Periode Tahun 1946 s/d 1994 dijabat H. Jambhuri
2. Periode Tahun 1994 s/d 2004 dijabat H. Ahmad Ihsan
3. Periode Tahun 2004 s/d 2013 dijabat M. Sidik Wahyudi
4. Periode Tahun 2013 s/d sekarang dijabat Sudarja

Wilayah Kalurahan Sinduharjo secara geografis sangat strategis, dilalui jalan Kaliurang yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Kalurahan Sinduharjo dan Kabupaten Sleman. Kalurahan Sinduharjo memiliki wilayah seluas ± 609.000 Ha. Keberadaan Kalurahan Sinduharjo di jalur wisata Kaliurang mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian maupun di bidang kependudukan. Wilayah Kalurahan Sinduharjo secara geografis berada pada ketinggian 150 m/DPL karena kalurahan Sinduharjo memiliki struktur tanah dataran rendah. Selain itu, kondisi curah hujan di kalurahan Sinduharjo rata-rata tiap tahun 2704 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 26°C s/d 32°C. Jarak dan waktu tempuh Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon, Kabupaten, dan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Jarak tempuh dari Kalurahan ke Kapanewon 0,5 Km dan 5 menit
2. Jarak tempuh dari Kalurahan ke Kabupaten 4 Km dan 15 menit
3. Jarak tempuh dari Kalurahan ke Provinsi 11 Km dan 25 menit

Wilayah Kalurahan Sinduharjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbatasan yang ada di Kal.Sinduharjo

Sebelah utara	: Kalurahan Sukoharjo dan Sardonoarjo
Sebelah timur	: Kalurahan Sukoharjo dan Kapanewon Ngemplak
Sebelah selatan	: Kalurahan Minomartani, Sariharjo dan Kapanewon Depok
Sebelah barat	: Kalurahan Sardonoarjo dan Sariharjo

*Sumber : Data Monografi 2022*

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada Tahun 1946, 3 (tiga) Kalurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Kalurahan Sinduharjo dan sampai saat ini perkembangan Kalurahan Sinduharjo meliputi 17 Padukuhan yang terdiri dari 42 RW dan 106 RT. Kalurahan Sinduharjo merupakan bagian internal dari wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Kalurahan, dan Kalurahan Sinduharjo secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 17 (tujuh belas) padukuhan dan 106 RT sebagaimana bisa dilihat dari table berikut.

Tabel 2.2 Data luas tanah per-padukuhan di Kal. Sinduharjo

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)	% Luas
1	Taraman	4	47.31	7.77%
2	Ngemplak	4	40.95	6.72%
3	Pedak	4	31.25	5.13%

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)	% Luas
4	Gadingan	5	24.2	3.97%
5	Dukuh	5	20.42	3.35%
6	Gentan	8	34.35	5.64%
7	Nglaban	6	40.05	6.58%
8	Palgading	5	27.86	4.57%
9	Tambakan	4	52.94	8.69%
10	Lojajar	8	32.93	5.41%
11	Ngentak	4	30.93	5.08%
12	Jaban	10	40.65	6.67%
13	Dayu	6	36.28	5.96%
14	Banteng	11	48.75	8.00%
15	Prujukan	4	20.38	3.35%
16	Ngabean Kulon	9	32.09	5.11%
17	Ngabean Wetan	9	4831	7.93%
Jumlah		106	609	100%

*Sumber : Data Monografi 2022*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa luasan padukuhan yang ada di Kalurahan Sinduharjo yang paling luas terletak pada Padukuhan Tambakan yang memiliki luas yaitu 52.94 Ha dan memiliki 4 RT dan yang luasannya paling sedikit adalah Padukuhan Prujakan yang memiliki luas yaitu 20.38 Ha dan memiliki 4 RT.

## **B. Penggunaan Tanah**

Kondisi penggunaan lahan tanah merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan



Sinduharjo. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis lahan sawah ke fungsi lainnya, baik digunakan untuk pemukiman maupun digunakan untuk fungsi yang lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat.

Namun dengan demikian, alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Luas wilayah kalurahan adalah : 609 Ha, dengan luas tanah tersebut terdiri dari berbagai jenis tanah, yaitu : Sawah, Tanah pekarangan / tanah kering, dan lain-lainnya. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2021 dilihat pada table berikut,

Tabel 2.3 Data Luas Tanah di Kal. Sinduharjo

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Sawah	274,05	45	243,6	40	225,56	37
2	Tanah Pekarangan Tanah Kering	310,59	51	333,64	55	351,67	58
3	Lain-lain	24,36	4	31,76	5	31,76	5
	Jumlah	609	100	609	100	608,99	100

Sumber : Data Monografi 2022

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) telah terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya seluas 41,08 Ha. Sengketa masalah Batas Kalurahan Sinduharjo dengan Kalurahan Kalurahan

yang berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Kalurahan Sinduharjo hingga Kepemimpinan Lurah saat ini.

### **C. Keadaan Demografis**

Kalurahan Sinduharjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2022, jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo sebanyak 18.252 jiwa yang tersebar di 17 pedukuhan dan 189 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 9161 jiwa lebih banyak daripada perempuan sebesar 9091 jiwa.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan Kalurahan, mengingat bahwa aset Kalurahan ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Keadaan demografi Kalurahan Sinduharjo dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Jumlah Menurut Gender**

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk

berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Menurut Gender Masyarakat Kal.Sinduharjo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	9161
2	Perempuan	9091
	Jumlah	18252

Sumber: *Data monografi Tahun 2022*

Berdasarkan data monografi pada tahun 2022, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 9161 jiwa lebih banyak daripada perempuan sebesar 9091 jiwa.

## 2. Jumlah Menurut Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan

disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022 tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Data Menurut Umur di Kal.Sinduharjo

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah
1	0-4	454
2	5-9	1053
3	10-14	1161
4	15-19	1302
No	Golongan Umur(Tahun)	Jumlah
5	20-24	1336
6	25-29	1147
7	30-34	1261
8	35-39	1695
9	40-44	1802
10	45-49	1465
11	50-54	1373
12	55-59	1048
13	60-64	928
14	65->>	2227
	Jumlah	18252

*Sumber: Data monografi tahun 2022*

Berdasarkan data monografi semester II tahun 2022, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo kelompok umur produktif (15-19 tahun) sebanyak 1302 jiwa atau sebesar 7,05% dan penduduk pada kelompok umur (20-24 tahun) sebanyak 1336 jiwa atau

sebesar 7,08%. Sementara proporsi untuk kelompok usia lanjut (60-64 tahun) sebanyak 928 jiwa atau sebesar 5,06%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) disebut sebagai jumlah penduduk nonproduktif. Data ini sangat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan seluruh penduduk semua klasifikasi umur diupayakan akan mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalurahan Sinduharjo.

### 3. Jumlah menurut Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kalurahan Sinduharjo yaitu Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Data Pendidikan di Kal.Sinduharjo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	2629
2	TK	602
3	Belum Tamat SD	1496
4	SD	1429

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
5	SMP	1747
6	SMA	5582
7	Akademi/D1-D3	1045
8	S1-S3	3722
	Jumlah	<b>2629</b>

Sumber : *Data monografi 2022*

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas tenaga kerjanya. Karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fsilitasi pendidikan sejak dini.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Sinduharjo sudah cukup baik, hal ini mengingat banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah mengenyam bangku pendidikan. Sehingga besar kemungkinan masyarakat Kalurahan Sinduharjo dapat membangun desanya sesuai dengan tingkat pendidikan/pengetahuan yang dimilikinya. Adapaun Fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Sinduharjo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.7 Data Prasarana Pendidikan di Kal.Sinduharjo

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	Play Group	8
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	11
3.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	3
4.	Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN)	1
5.	Sekolah Dasar Swasta	1
6.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	1
7.	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN)	1
8.	Sekolah Menengah Pertama Swasta	2
9.	Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	3
10.	Pondok Pesantren	3

Sumber: *Data monografi 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tempat pendidikan di Kalurahan Sinduharjo ada 34 yang terdiri dari 8 Play Group, 11 Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Sekolah Dasar (SDN), 1 Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), 1 Sekolah Dasar Swasta, 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN), 2 Sekolah Menengah Pertama Swasta, 3 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dan 3 Pondok Pesantren.

#### 4. Jumlah Keluarga

Disamping data jumlah penduduk gambaran kondisi kependudukan sebagaimana dijabarkan diatas, data jumlah keluarga atau KK (Kepala Keluarga) juga perlu diketahui. Berdasarkan data monografi semester II tahun 2022, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Sinduharjo tercantum dalam

tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8 Jumlah KK di Kal.Sinduharjo

No.	Pedukuhan	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga		Jumlah
			Laki – Laki	Perempuan	
1	Taraman	718	198	46	244
2	Ngemplak	576	141	32	173
3	Pedak	612	247	45	292
4	Gadingan	593	217	58	275
5	Dukuh	540	138	21	159
6	Gentan	940	488	117	605
7	Nglaban	692	203	36	239
8	Palgading	694	196	23	219
9	Tambakan	817	364	88	452
10	Lojajar	774	297	55	352
11	Ngentak	714	263	64	327
12	Jaban	2242	1033	188	1221
13	Dayu	1048	450	85	535
14	Banteng	2539	1061	210	1271
15	Prujukan	998	412	73	485
16	Ngabean Kulon	1992	685	123	808
17	Ngabean Wetan	1763	729	122	851

Sumber : *Data Monografi Tahun 2022*

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Banteng sebanyak 1061 KK dan terendah terdapat di Pedukuhan Dukuh sebanyak 210 KK.

#### 5. Angkatan kerja

Jumlah angka pengangguran di Kalurahan Sinduharjo cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka



pengangguran diantaranya melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, pemberian fasilitas modal kerja, pendirian Badan Usaha Milik Desa Sinduharjo dan lain-lain. Dengan adanya unit usaha BUMDes yang berdiri sejak tahun 2015 terbukti telah dapat menampung tenaga kerja kurang lebih sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari masyarakat lokal Kalurahan Sinduharjo.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022, maka dapat dikelompokkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.9 Data Pekerjaan Kal.Sinduharjo

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1	Petani/Pekebun	185	121	306
2	Belum/Tidak Bekerja	1578	1688	3266
3	Pelajar/Mahasiswa	2247	1790	4037
4	Mengurus Rumah Tangga	0	2544	2544
5	Karyawan Swasta	1827	1189	3016
6	Wiraswasta	1103	491	1594
7	Buruh Tani/Perkebunan	97	97	194
8	Pegawai Negeri Sipil ( Pns )	383	276	659
9	Buruh Harian Lepas	475	131	606
10	Pensiunan	437	172	609
11	Guru	24	93	117
12	Pedagang	42	69	111
13	Pekerjaan Lainnya	9	6	15
14	Kepolisian Ri ( Polri )	56	7	63
15	Sopir	19	0	19
16	Perangkat Desa	19	4	23
17	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	44	0	44
18	Karyawan Honorer	25	21	46
19	Perawat	3	28	31

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah
20	Tukang Batu	21	0	21
21	Tukang Kayu	6	0	6
22	Dosen	75	63	138
23	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
24	Tukang Cukur	2	0	2
25	Tukang Rias	0	4	4
26	Penata Rambut	0	2	2
27	Perancang Busana	0	2	2
28	Penterjemah	2	0	2
29	Imam Masjid	2	0	2
30	Pendeta	4	2	6
31	Tukang Jahit	3	11	14
32	Perdagangan	140	79	219
33	Karyawan BUMN	92	52	144
34	Buruh Peternakan	2	0	2
35	Karyawan BUMD	12	12	24
36	Pembantu Rumah Tangga	0	22	22
37	Mekanik	7	0	7
38	Seniman	11	3	14
39	Bidan	0	12	12
40	Industri	14	7	21
41	Tukang Listrik	1	0	1
42	Pastor	90	0	90
43	Wartawan	8	2	10
44	Ustadz/Mubaligh	3	0	3
45	Pengacara	3	3	6
46	Dokter	42	59	101
47	Pelaut	7	0	7
48	Kepala Desa	1	0	1
49	Peternak	8	2	10
50	Pilot	2	0	2
51	Notaris	2	3	5
52	Arsitek	9	4	13
No	Pekerjaan			
53	Konsultan	10	3	13
54	Apoteker	3	11	14
55	Psikiater/Psikolog	2	4	6
56	Penyiar Radio	1	0	1
57	Peneliti	2	2	4
58	Jumlah	9161	9091	18252

Sumber: *Data monografi 2022*

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun 2022, mata pencaharian penduduk sebagian besar di dominasi sebagai buruh dan wiraswasta atau pedagang.

b. Keadaan Sosial dan Budaya

Salah satu ciri khusus yang melekat pada masyarakat desa ialah sifat gotong-royong. Hal ini berlaku juga untuk masyarakat Kalurahan Sinduharjo. Dengan kondisi masyarakat desa yang masih sangat memegang kuat sifat kerukunan, gotong royong yang merupakan sifat yang melekat kuat hingga saat ini pada masyarakat Kalurahan Sinduharjo. Adapun sifat gotong royong ini diwujudkan dalam pembangunan fasilitas umum seperti pembuatan saluran air irigasi, pembuatan pos ronda, perbaikan jalan, dan gotong-royong yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Selain itu gotong-royong juga dilakukan ketika ada kebutuhan atau kepentingan individual seperti membantu tetangga mengangkut hasil panen, ketika tetangga ada acara atau hajatan, membantu tetangga disaat ada anggota keluarga yang baru lahir atau meninggal, dan kegiatan-kegiatan yang masih menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu profil keadaan sosial juga berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat seperti agama, kesehatan, ekonomi, dan masalah sosial.

## 1. Agama

Pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk Kalurahan Sinduharjo sebanyak 18.409 jiwa yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda yang dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Data Agama di Kal.Sinduharjo

No	Agama/Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	15181
2	Kristen	898
3	Katholik	2102
4	Hindu	43
5	Budha	20
6	Konghucu	5
7	Kepercayaan	3
	Jumlah	18252

Sumber: *Data monografi 2022*

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Sinduharjo menganut agama Islam dan minoritas menganut 3 kepercayaan lainnya. Meskipun demikian, setiap warga yang melaksanakan perayaan keagamaan tetap saling menjaga dan saling menghormati, karena warga Kalurahan Sinduharjo memiliki tingkat toleransi yang tinggi.

## 2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk

mencapai kesehatan yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan mengsosialisasikan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lansia, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi lansia. Pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di pedukuhan yang berada di Kalurahan Sinduharjo.

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota

keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp.1.500,- untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 800.000,-. Dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp.2.500.000,00, tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Sinduharjo pada tahun 2015 – 2020 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Jumlah Kemiskinan Kal. Sinduharjo

No	Tahun	Jumlah KK Miskin
1	2015	296
2	2016	261
3	2017	251

No	Tahun	Jumlah KK Miskin
4	2018	252
5	2019	236
6	2020	228

*Sumber : data TKPKD 2015 – 2020*

Dari data diatas menunjukkan bahwa disetiap tahunnya jumlah KK miskin di Kalurahan Sinduharjo terus mengalami penurunan. Dapat dijelaskan bahwa mulai dari tahun 2015 semula memiliki jumlah 296 KK Miskin di Kalurahan Sinduharjo, di tahun 2016 memiliki jumlah 261 itu artinya mengalami penurunan sejumlah 35 kk miskin, begitupun diikuti tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2020 jumlah KK Miskin ada 228 yang berarti sudah mengalami banyak penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun jumlah berkurangnya tidak selalu sama namun tetap konsisten selalu mengalami penurunan jumlah KK miskin di Kalurahan Sinduharjo yang artinya di setiap tahunnya pula terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Sinduharjo.

#### 4. Budaya

Di samping hubungan sosial berupa gotong royong yang masih sangat melekat, masyarakat Kalurahan Sinduharjo juga masih memelihara utuh adat budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang. Adapun warisan adat yang sampai saat ini masih dilestarikan meliputi: upacara tradisi daur hidup dan upacara adat. Upacara tradisi daur hidup yang terdiri dari Mapati, Nglimani,

Mitoni/Tingkeban, Jagong Lahiran, Brokohan, Sepasaran, Puputan, Selapanan, Tedhak Siti, Supitan/Tetesan, Siraman, Midodareni, Manten, Sripah yang dilestarikan oleh seluruh padukuhan yang ada di Kalurahan Sinduharjo. Sedangkan upacara adat terdiri dari: Nyadran, Kenduri di Padukuhan Tambakan, Dayu, Dukuh, Ngabean Wetan, Pedak, Jaban, dan Taraman, Sodaqohan di Padukuhan Taraman dan Tambakan, Merti Kali di Padukuhan Jaban dan Ngabean Wetan, Merti Dusun di Padukuhan Lojajar dan Prujakan, Wiwit di Padukuhan Taraman, Pedak, dan Ngemplak, Mauludan di Padukuhan Dukuh, Jaban, Dayu, dan Taraman, Ruwahan di Padukuhan Dukuh dan Dayu, Saparan di Padukuhan Dukuh, 21an Ramadhan di Padukuhan Dayu, Jaban, dan Taraman, Merti Desa di Lingkungan Desa Sinduharjo, Kupatan Syawalan di Padukuhan Jaban.



## 5. Cagar Budaya

Cagar budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dijaga masyarakat adalah Candi Palgading. Candi Palgading adalah candi dengan latar belakang agama Budha. Dinamakan Candi Palgading karena terletak di wilayah Padukuhan Palgading, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Palgading ini sudah dikenal sejak jaman pemerintahan Belanda. Candi Palgading ini ditemukan pada tahun 2006 dan dilakukan pemugaran beberapa kali. Candi ini sudah menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh Baladi Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.

## 6. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Sinduharjo sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Sinduharjo dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa. Usaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis barang dan jasa bagi masyarakat Kalurahan Sinduharjo ditunjang oleh adanya sarana perekonomian yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.13 Data Saranan Perekonomian di Kal.Sinduharjo

No	Sarana Perekonomian	Jumlah
1.	Pasar Kabupaten	1
2.	Swalayan	14
3.	KUD	1
4.	Bank, BPR	4
5.	Bumdes	1
6.	BUKP	1

Sumber: RPJMKalurahan Sinduharjo Tahun 2022

## 7. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kalurahan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Lurah terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Kalurahan secara partisipatif.

### a) VISI

Terwujudnya Kalurahan Sinduharjo yang makmur, aman tenteram, sejahtera, dan produktif (mantap) berbasis pertanian.

Makmur : terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Aman : Terciptanya masyarakat yang terayomi.

Tenteram : Terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, bijak dalam bertindak.

Produktif : Terwujudnya masyarakat yang memiliki rasa tercukupi, pangan, sandang, Papan, pendidikan, kesehatan.

b) MISI

- a. Meningkatkan intensifikasi produk pertanian.
- b. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan penuh toleransi.
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kalurahan.
- e. Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas dalam memberikan layanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan untuk Visi dan Misi Lurah Kalurahan Sinduharjo untuk periode saat ini atau enam tahun mendatang (2020-2026) adalah:

a. Visi

Merencanakan pembangunan (2020-2026) demi terwujudnya pemerintah desa dan warga masyarakat lebih sejahtera lahir batin, berbudaya, berkeadilan gender serta tidak membedakan ras, golongan agama maupun kultur. Visi ini mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kalurahan Sinduharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan sejahtera

untuk seluruh masyarakat Sinduharjo tanpa membedakan baik dari ras, golongan, agama dan kultur.

b. Misi

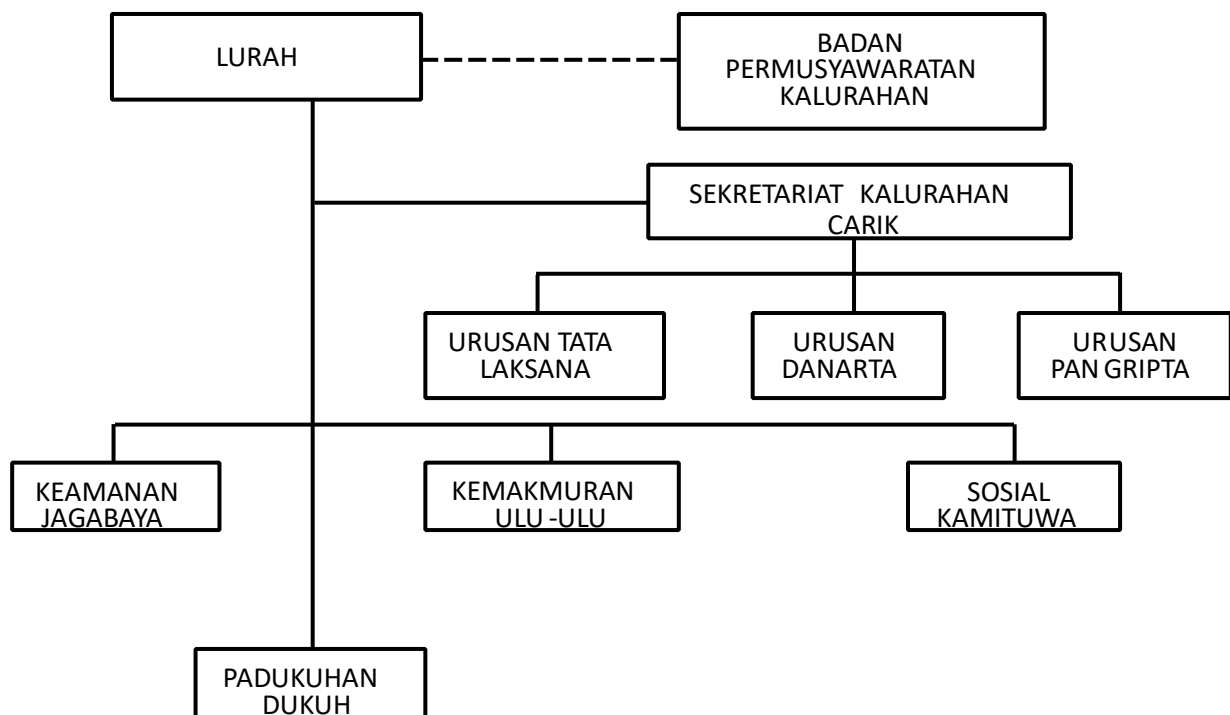
Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Persyaratan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Sinduharjo dalam RPJMKal Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan tata kelola Pemerintah Desa Baik kualitas maupun pelayanan terhadap warga masyarakat secara transparansi.
- Menginventarisasi dan meningkatkan tatacara pengelolaan sumber daya alam baik tanah Kas Desa, tanah pelungguh, Kios Desa dan Lingkungan Hidup.

## 8. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam pemerintah kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan. Struktur organisasi Kalurahan Sinduharjo tahun 2022 terdiri dari Lurah, Carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 17 (tujuh belas) dukuh, 7 staff desa dan 2 staff kebersihan. Struktur organisasi Kalurahan Sinduharjo digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Sinduharjo



*Sumber: RPJM KALURAHAN TAHUN 2022*

*Keterangan: Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD) bukan unsur pemerintah kalurahan melainkan BPKal itu mitra kalurahan.*

Komposisi sumber daya manusia perangkat Kalurahan Sinduharjo tertera dalam tabel berikut

Tabel 2.14 Data Perangkat Kalurahan Sinduharjo

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
1	Lurah	Sudarja	SLTA	9 Tahun
2	Carik	Faizal Nur Achmad	S1	6
3	Kepala Urusan Tata Laksana	Wahyu Nurhadi	SLTA	6
4	Kepela Urusan Danarta	Eddy Indrayatna	S1	21
5	Kepala Urusan Pangripta	Astadi	S1	12
6	Jagabaya	Prih Diyan Tono	S1	21
7	Ulu-Ulu	Sumarno	SLTA	25
8	Kamituwa	Sri Ratnawati	S1	18
9	Dukuh Taraman	Partinah	SLTA	29
10	Dukuh Ngemplak	Danang Anggriawan	S1	6
11	Dukuh Pedak	Ginanto	SLTA	13
12	Dukuh Gadingan	Bambang Surarso	SLTA	29
13	Dukuh Dukuh	Widayat Yogyanti	SLTA	13
14	Dukuh Gentan	Sugiyana	SLTA	13
15	Dukuh Nglaban	Dicky	SLTA	1

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
16	Dukuh Palgading	Tumirah	SLTA	21
17	Dukuh Tambakan	Ahmad Ali Umar	S1	13
18	Dukuh Lojajar	Drajad Giri P	S1	5
19	Dukuh Ngentak	Joko Bintoro	SLTA	29
20	Dukuh Jaban	Hastunggoro	SLTA	3
21	Dukuh Dayu	Iswadi Handoko	SLTA	1
22	Dukuh Banteng	Ismadi	S1	21
23	Dukuh Prujakan	Suproyo	S1	13
24	Dukun Ngabean Kulon	PJ Dukuh Ngabean Wetan	-	
25	Dukuh Ngabean Wetan	Ignatius Budi Santoso	SLTA	9
26	Staff Pamong	Dewi Anita Rosidaningrum	S1	6
27	Staff Pamong	Suparno	SLTA	6
28	Staff Pamong	Efrilla Kurnia Bagus Kuncoro	S1	4
29	Staff Pamong	Dhevy Eny Kristanti	D3	6
30	Staff Pamong	Anggoro Septian Prabowo	SLTA	4
31	Staff Pamong	Cahya Teguh Hidayat	S1	3
32	Staff Pamong	Muhammad Ridwan Mas	S1	1
33	Staff Pamong	Joko Pitoyo	SLTA	2
34	Staff Pamong	Tri Yono	SLTA	1

*Sumber: Data monografi 2022*

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Sinduharjo memiliki 24 pamong kalurahan yang terdiri dari, Lurah, Carik, Kaur Tata Laksana dan 3 staff, Kaur Danarta dan 1 staff, Kaur Pangripta, Jagabaya dan 1 staff, Ulu-Ulu dan 1 staff, Kamituwa dan 1 staff, dukuh dari 17 padukuhan, dan 2 staff pamong lainnya. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPKal) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah 9 orang.

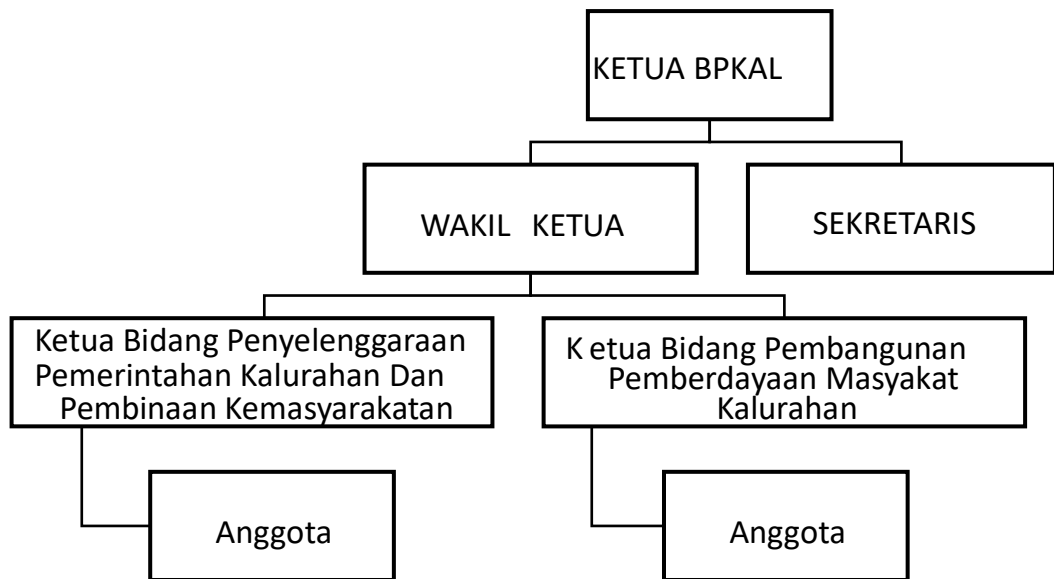
Fungsi BPKal adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah. Dari ketiga tugas ini sudah jelas BPKal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan. BPKal juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Bamuskal harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPKal dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan kalurahan.

BPKal juga menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Bamuskal memiliki kekuatan untuk



mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek. Struktur organisasi BPKal ditunjukkan sebagai berikut:

Bagan 2.2 Stuktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo



Komposisi sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.14 Data Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Sinduharjo

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
1	Ketua	Sukoco, SE.	S1	1 Periode
2	Wakil Ketua	Endang Setyowati, SE.	S1	1 Periode
3	Sekretaris	M. Dony Ramadhan, S.HI.	S1	1 Periode
4	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Sri Utami (ketua bidang)	S1	1 Periode
		Rewitri Puji Lestari (anggota)	SLTA	1 Periode
		Drs. Sulistyoyo (anggota)	S2	1 Periode

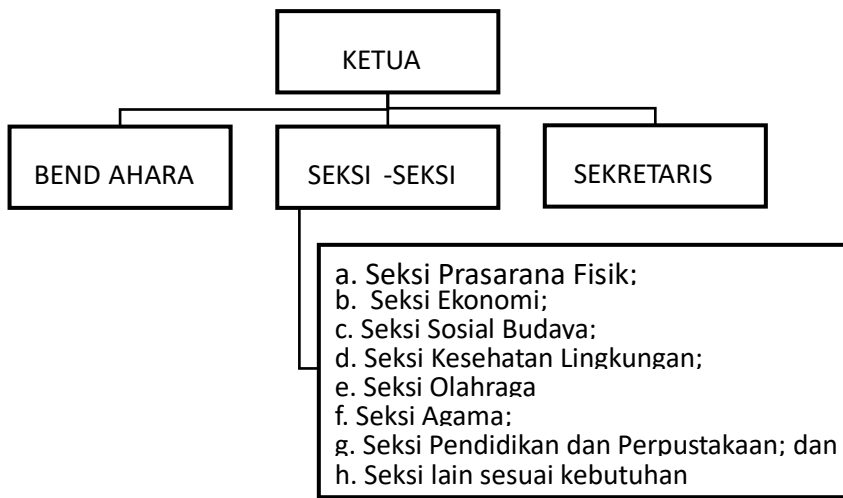
7	Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Y Wusana (Ketua Bidang)	SLTA	1 Periode
		Sumarja Hdi (anggota)	SLTA	1 Periode
		Sriyanto Dwi Prastawa (anggota)	SLTA	1 Periode

*Sumber : Struktur Kelembagaan BPKal Sinduharjo*

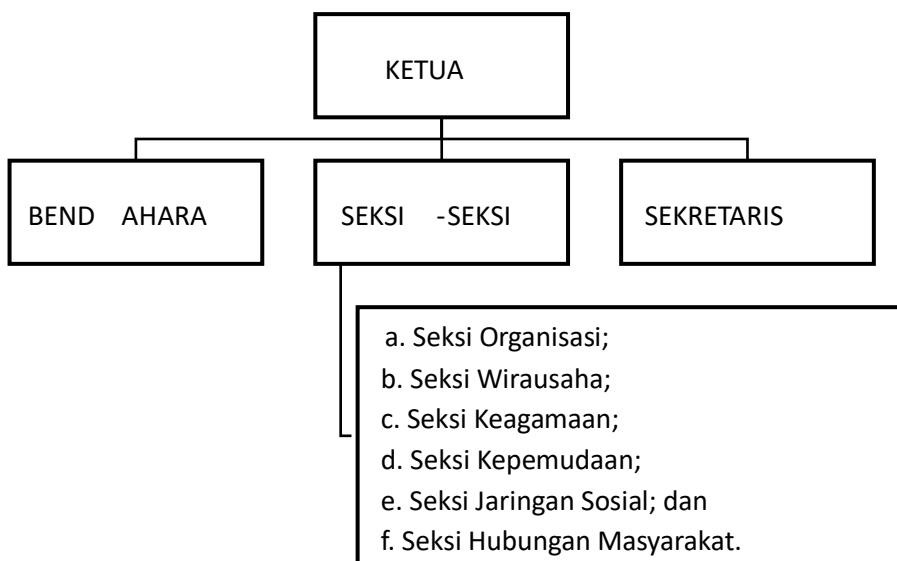
Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Sinduharjo antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK) dan Karang Taruna Gelora Muda Sinduharjo. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Sub Unit LPMK, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan, dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan Rukun Tetangga dan dasawisma. Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya. Adapun Bagan Struktur Organisasi LPMK, TP PKK Kalurahan, Karang Taruna Kalurahan dan RT digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masy Kal.Sinduharjo



Bagan 2.4 Karang Taruna Kalurahan Sinduharjo



Selain lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu Satgas Desa Tanggap Bencana (Destana), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Forum Anak Sinduharjo Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan lain-lain. Adapun

kepengurusan harian masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut dituliskan sebagai berikut:

Tabel 2.16 Data Anggota Kelembagaan Kalurahan Sinduharjo

No	Nama Lembaga	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	TP-PKK Kal	Sulistiyowati	Sumarsih	Widayat Y.
2	LPMK	Pramono Hadi	Sumadi	Sumarsih
3	Karang Taruna	Ayub Bondan Setyawan	Cahya Teguh Hidayat	Irmayati Istiqomah
4	Destana	Prih Diyan Tono	Anggoro Septian Prabowo	Eddy Indrayatna
5	Gapoktan	Surani	Untari	Sumarsih
6	Forum Anak	M. Zaid Rizky	Fidara Febiani	Risky Agung N

*Sumber : Data Monografi Desa 2022*

## 9. Pelayan Publik

Pemerintah Kalurahan Sinduharjo telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Sinduharjo belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu, dan sampai tahun 2022 yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:

- a. Surat/blanko Pengantar Nikah
- b. Surat/blanko Pengantar Cerai
- c. Surat/blanko Pengantar Rujuk

- d. Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah
- e. Surat/blanko Keterangan Wali Nikah
- f. Surat/blanko Pengantar Bepergian
- g. Surat/blanko Keterangan Kelahiran
- h. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara (Domisili)
- i. Surat/blanko Keterangan Kematian
- j. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
- k. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah
- l. Surat/blanko Keterangan Tanah/Letter C
- m. Surat/blanko Keterangan Pengantar Lainnya.

Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:

- a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
- b. Legalisasi Pos Wesel
- c. Legalisasi Surat Kuasa
- d. Legalisasi Jenis-Jenis Surat lainnya

Pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :

- a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijib Gangguan

- b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
- c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Rekomendasi Konversi Tanah
- e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
- f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
- g. Rekomendasi Lainnya.

Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :

- a. Jual-beli
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Pembagian Warisan
- e. Waqaf

Pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari:

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
- b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum

Pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari:

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
- b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
- c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Masyarakat

Pelayanan sewa gedung olahraga yang terdiri dari:

- a. Sewa Gedung Olahraga pada Pagi Hari
- b. Sewa Gedung Olahraga pada Siang Hari
- c. Sewa Gedung Olahraga pada Malam Hari
- d. Sewa Gedung Olahraga Sehari
- e. Sewa Gedung Olahraga Sehari Semalam

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan keputusan masyarakat. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (*service performance standard*) serta desain ruangnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “*Digitalisasi Desa di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.*”

Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan hadirnya digitalisasi desa sempat membuat pemerintah Kalurahan kebigungan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kalurahan bingung untuk memulai dari mana dan bagaimana membawa masyarakat agar bisa menggunakan teknologi. Tetapi dengan berbagai penyesuaian dan adaptasi, pada akhirnya pemerintah Kalurahan Sinduharjo mampu mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan (transparansi) dan kemudahan akses (akseibilitas) yang berkaitan dengan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan bagi masyarakat.
2. Upaya pemerintah Kalurahan dalam pengembangan SID merupakan bagian dari kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, guna menciptakan sistem informasi pelayanan pemerintahan yang terintegrasi mulai dari tingkat desa hingga nasional. Tetapi awalnya hal ini justru memberatkan pemerintah di tingkat desa karena harus berhadapan dengan mayoritas penduduknya yang masih belum melek ilmu pengetahuan dan



teknologi (IPTEK). Alhasil, dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa proses pengembangan SID di Kalurahan Sinduharjo belum berjalan signifikan. Hal ini disebabkan karena disatu sisi mayoritas masyarakat masih terbiasa dengan sistem pelayanan publik yang bersifat konvensional, sedangkan disisi lain karena masih kurangnya keterampilan dari operator SID itu sendiri dalam menyajikan informasi maupun konten-konten yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.

3. Upaya pemerintah Kalurahan Sinduharjo dalam melakukan transformasi pelayanan publik dari yang bersifat konvensional untuk beralih pada pelayanan yang berbasis digital masih mengalami tantangan yang kompleks. Dalam temuan peneliti, tantangan-tantangan tersebut misalnya berkaitan dengan kondisi masyarakat yang masih belum melek teknologi terutama masyarakat lanjut usia sehingga mereka belum sepenuhnya dapat memanfaatkan SID sebagai sarana informasi yang memudahkannya dalam kaitannya dengan pelayanan publik di tingkat Kalurahan itu sendiri. Tantangan lainnya juga dipengaruhi karena masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat Kalurahan itu sendiri dalam pengelolaan SID terutama dalam pengelolaan website Kalurahan sehingga mengakibatkan pelayanan pemerintah Kalurahan Sinduharjo yang berbasis digital belum berjalan optimal.

4. Dalam proses pengejawantahan pelayanan pemerintah Kalurahan yang berbasis digital, maka pemerintah Kalurahan Sinduharjo kemudian melakukan inovasi-inovasi yang relevan dengan kondisi mayoritas masyarakatnya. Dalam temuan peneliti, inovasi tersebut bermuara pada pengembangan sistem informasi desa yang tidak hanya sekedar mengandalkan *Website*, tetapi juga melalui sosial media (Sosmed) Kalurahan seperti grup *Whatsapp* (WA), *Facebook* (FB) dan *Instagram* (IG). Dalam temuan peneliti di lapangan, mayoritas masyarakat Sinduharjo lebih banyak mengupdate informasi yang bersumber dari Sosmed ketimbang dari Website Kalurahan. Hal ini dikarenakan akses ke Website yang masih terkesan rumit dan terkadang mengalami eror. Disisi lain juga karena template, konten, dan informasi di website yang masih belum *up to date* secara berkelanjutan. Hal ini juga dipengaruhi oleh operator SID di Kalurahan Sinduharjo itu sendiri yang masih terbatas karena hanya terdapat satu orang saja, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan postingan dan updetan informasi kesemua media Kalurahan yang ada.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti memandang bahwa pada prinsipnya kemajuan zaman dewasa ini tidak dapat dielakkan lagi. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era Revolusi Industri 4.0 atau bahkan Society 5.0 dewasa ini, memang manusia dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai

tantangan dan permasalahan sosial yang dihadapinya dengan memanfaatkan berbagai inovasi teknologi yang sedang berkembang, sehingga teknologi tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Oleh karenanya, peneliti memandang bahwa pengembangan Digitalisasi Desa di Kalurahan Sinduharjo merupakan proses yang relevan di era modern saat ini yang dimana hampir semua lini kehidupan manusia telah bertransformasi pada sistem yang berbasis digital. Namun, dengan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan yang ada, maka ini juga akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Kalurahan Sinduharjo untuk memastikan bahwa semua masyarakat Sinduharjo tetap mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah Kalurahan itu sendiri. Artinya, bagi mereka yang belum dapat mengakses SID, bukan berarti mereka ditinggalkan begitu saja, tetapi mereka juga perlu dibimbing dan diberdayakan agar semuanya dapat bergerak maju (menjadi masyarakat digital yang bijak) secara bersama; sehingga dampak positif dari Digitalisasi Desa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat Sinduharjo guna meningkatkan kualitas hidupnya.

## **B. SARAN**

Untuk pengembangan Digitalisasi Desa di Kalurahan Sinduharjo secara berkelanjutan, maka peneliti hendak memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Sinduharjo perlu memberikan maupun meningkatkan literasi digital masyarakat setempat melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya sistem digital untuk memudahkan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kalurahan Sinduharjo.
2. Pemerintah Kalurahan juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan agar adanya *upgrade* pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem digital dan SID guna meningkatkan pelayanan publik yang berbasis digital secara maksimal dan berkelanjutan.
3. Operator SID juga perlu mendapatkan pelatihan khusus perihal cara mengoperasikan Website dan Sosil Media (Sosmed) Kalurahan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan sistem informasi Kalurahan yang up to date secara berkelanjutan dan terintegrasi antara Website dengan Sosmed. Selain itu, perlu juga adanya tambahan personil operator SID guna memasifkan sistem informasi Kalurahan kesemua media yang ada.

4. Karena pengembangan Digitalisasi Desa merupakan kerja sama dengan pemerintah di atasnya, maka pemerintah di atasnya juga perlu melakukan bimbingan dan monitoring secara berkala terkait perkembangan SID di tingkat Kalurahan. Pada konteks ini, peran Kominfo secara kelembagaan sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Sistem Informasi Desa di Kalurahan Sinduharjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 10–24. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901>
- Asmara, J. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 2(1), 1–7.
- Desa, D. I., Kecamatan, M., & Mayang, B. (2019). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang*.
- Eko, Sutoro. Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta: STPMD “APMD”, Jurnal Governabilitas Vol. 2 No. 1. 2021.
- Fahri, M. U. (2020). Sistem Informasi Desa. *Sid.Kemendes.go.Id*, 64.
- Fauziah, D. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Jom FISIP*, 4(1), 103–111.
- Hatfield-Dodds, Steve., Nelson & Cook. 2007. Adaptive Governance : *Introduction, And Implication For Public Policy. Australian Agree Curtural And Resourch Economics society. Core.*
- Herabudin. (2016). Studi Kebjikan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Jehamat, L. (2011). Pola Relasi Sosial Elit Tradisional :Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. *Jurnal Demokrasi*, 10(1), 67–84.
- Muh Kamim, A. B. (2023). Pembangunan dan Ekonomi Politik Turisme Massal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-*

*Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 51.  
<https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.791>

- Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Persaingan Di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). *Molecules*, 9(1),148–162.  
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65>  
<http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cn>  
<http://dx.doi.org/10.1155/2015/420723>  
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Puspitasari, C., Sumarjono, Perdana, P., & Mardhika, J. G. (2022). Pola Relasi Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governanceterhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Akuntabilitas*, 13(2), 155–166. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9516>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Triyo, E., Haryono, & Irwantoro. (2020). Strategi inovasi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) 1Ely. *Cakrawala Journal*, 14(2), 172–182. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>

## LAMPIRAN FOTO

Gambar 1. Wawancara bersama Carik Kal.Sinduharjo (Pak Faizal)



Gambar 2. Foto wawancara dengan Operator SID Kal.Sinduharjo (Pak Ridwan)





Gambar 3. Wawancara bersama staff Dinas KOMINFO (Pak Yusak)



Gambar 4. Foto wawancara dengan Staff Dinas PMK (Mbak Siska)



Gambar 9. Wawancara dengan warga (Mbak Selli)



Gambar 10. Wawancara dengan warga (Mbak Nadia)



Gambar 11. Wawancara dengan warga (Mbak Putri)

